

Nomor : B/206/PP.00.01/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : **Pemberitahuan Pemeliharaan Sistem
SKM Online**

13 Oktober 2026

Yth.
(Daftar Terlampir)
di
Tempat

Dalam rangka mendukung kelancaran proses pengolahan dan penarikan data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai bahan perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi (RB), bersama ini kami sampaikan bahwa akan dilaksanakan pemeliharaan sistem SKM Online yang dapat diakses melalui laman <https://skm.go.id>, dengan jadwal sebagai berikut:

Hari, tanggal: Selasa-Rabu, 13-14 Oktober 2026

Waktu: Selasa, pukul 13.00 WIB sampai dengan Rabu, pukul 05.00 WIB.

Selama periode pemeliharaan berlangsung, layanan SKM Online untuk sementara tidak dapat diakses. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengimbau seluruh instansi pengguna SKM Online untuk menyesuaikan pelaksanaan aktivitas pengelolaan, pengisian, dan pemutakhiran data SKM dengan jadwal pemeliharaan dimaksud guna menghindari kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

Sistem SKM Online akan dapat digunakan kembali setelah proses pemeliharaan selesai. Kami mengharapkan pengertian dan kerja sama seluruh instansi atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul selama proses pemeliharaan berlangsung.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

INSAN FAHMI

Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi
Publik

NIP. 197404122021061001

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 261013GIQK
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

DAFTAR PENERIMA SURAT

Yth. Kepala Biro/Bagian Organisasi pada
Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kota/Kabupaten

Kementerian Koordinator

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasalahan
3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
5. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
6. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7. Kementerian Koordinator Bidang Pangan

Kementerian

8. Kementerian Dalam Negeri
9. Kementerian Luar Negeri
10. Kementerian Pertahanan
11. Kementerian Agama
12. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
13. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
14. Kementerian Transmigrasi
15. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
16. Kementerian Hukum
17. Kementerian Hak Asasi Manusia
18. Kementerian Imigrasi dan Pemasaran
19. Kementerian Kelautan dan Perikanan
20. Kementerian Kesehatan
21. Kementerian Ketenagakerjaan
22. Kementerian Keuangan
23. Kementerian Komunikasi dan Digital
24. Kementerian Kehutanan
25. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
26. Kementerian Pekerjaan Umum
27. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman
28. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
29. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
30. Kementerian Kebudayaan
31. Kementerian Perdagangan
32. Kementerian Perhubungan
33. Kementerian Perindustrian
34. Kementerian Pertanian
35. Kementerian Sosial
36. Kementerian Sekretariat Negara

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSN**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 261013GIQK
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

37. Kementerian Koperasi
38. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
39. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
40. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
41. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
42. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
43. Kementerian Pemuda dan Olahraga
44. Kementerian Pariwisata
45. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
46. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Lembaga

47. Majelis Permusyawaratan Rakyat
48. Dewan Perwakilan Daerah
49. Dewan Perwakilan Rakyat
50. Mahkamah Agung
51. Kejaksaan Agung
52. Komisi Yudisial
53. Mahkamah Konstitusi
54. Ombudsman RI
55. Sekretariat Kabinet
56. Pusat Reformasi Birokrasi TNI
57. Asrena Kepolisian Republik Indonesia
58. Komisi Aparatur Sipil Negara
59. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
60. Komisi Pemberantasan Korupsi
61. Komisi Pemilihan Umum
62. Arsip Nasional Republik Indonesia
63. Badan Informasi Geospasial
64. Badan Intelijen Negara
65. Badan Keamanan Laut
66. Badan Kepegawaian Negara
67. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
68. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
69. Badan Narkotika Nasional
70. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
71. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
72. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/BASARNAS
73. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
74. Badan Pembina Ideologi Pancasila
75. Badan Pemeriksa Keuangan
76. Badan Pengawas Obat dan Makanan
77. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
78. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
79. Badan Pengawasan Pemilihan Umum
80. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSN**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 261013GIQK
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

81. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
82. Badan Pusat Statistik
83. Badan Riset dan Inovasi Nasional
84. Badan Siber dan Sandi Negara
85. Badan Standardisasi Nasional
86. Badan Pangan Nasional
87. Dewan Ketahanan Nasional
88. Lembaga Administrasi Negara
89. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
90. Lembaga Ketahanan Nasional
91. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
92. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
93. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
94. Perpustakaan Nasional

Pemerintah Daerah

1. Provinsi Aceh

1. Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
2. Kabupaten Aceh Barat
3. Kabupaten Aceh Barat Daya
4. Kabupaten Aceh Besar
5. Kabupaten Aceh Jaya
6. Kabupaten Aceh Selatan
7. Kabupaten Aceh Singkil
8. Kabupaten Aceh Tamiang
9. Kabupaten Aceh Tengah
10. Kabupaten Aceh Tenggara
11. Kabupaten Aceh Timur
12. Kabupaten Aceh Utara
13. Kabupaten Bener Meriah
14. Kabupaten Bireuen
15. Kabupaten Gayo Lues
16. Kabupaten Nagan Raya
17. Kabupaten Pidie
18. Kabupaten Pidie Jaya
19. Kabupaten Simeulue
20. Kota Banda Aceh
21. Kota Langsa
22. Kota Lhokseumawe
23. Kota Sabang
24. Kota Subulussalam

2. Provinsi Sumatera Utara

1. Provinsi Sumatera Utara
2. Kabupaten Asahan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSN**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 261013GIQK
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

3. Kabupaten Batu Bara
 4. Kota Binjai
 5. Kabupaten Dairi
 6. Kabupaten Deli Serdang
 7. Kota Gunungsitoli
 8. Kabupaten Humbang Hasundutan
 9. Kabupaten Karo
 10. Kabupaten Labuhanbatu
 11. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 12. Kabupaten Labuhanbatu Utara
 13. Kabupaten Langkat
 14. Kabupaten Mandailing Natal
 15. Kota Medan
 16. Kabupaten Nias
 17. Kabupaten Nias Barat
 18. Kabupaten Nias Selatan
 19. Kabupaten Nias Utara
 20. Kabupaten Padang Lawas
 21. Kabupaten Padang Lawas Utara
 22. Kota Padang Sidempuan
 23. Kabupaten Pakpak Bharat
 24. Kota Pematang Siantar
 25. Kabupaten Samosir
 26. Kabupaten Serdang Bedagai
 27. Kota Sibolga
 28. Kabupaten Simalungun
 29. Kota Tanjung Balai
 30. Kabupaten Tapanuli Selatan
 31. Kabupaten Tapanuli Tengah
 32. Kabupaten Tapanuli Utara
 33. Kota Tebing Tinggi
 34. Kabupaten Toba Samosir
- 3. Provinsi Sumatera Barat**
1. Provinsi Sumatera Barat
 2. Kabupaten Agam
 3. Kota Bukittinggi
 4. Kabupaten Dharmasraya
 5. Kabupaten Kepulauan Mentawai
 6. Kabupaten Lima Puluh Kota
 7. Kota Padang
 8. Kota Padang Panjang
 9. Kabupaten Padang Pariaman
 10. Kota Pariaman
 11. Kabupaten Pasaman
 12. Kabupaten Pasaman Barat
 13. Kota Payakumbuh
 14. Kabupaten Pesisir Selatan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSN**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 261013GIQK
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

15. Kota Sawah Lunto
 16. Kabupaten Sijunjung
 17. Kabupaten Solok
 18. Kota Solok
 19. Kabupaten Solok Selatan
 20. Kabupaten Tanah Datar
4. **Provinsi Riau**
 1. Provinsi Riau
 2. Kabupaten Bengkalis
 3. Kota Dumai
 4. Kabupaten Indragiri Hilir
 5. Kabupaten Indragiri Hulu
 6. Kabupaten Kampar
 7. Kabupaten Kepulauan Meranti
 8. Kabupaten Kuantan Singingi
 9. Kota Pekanbaru
 10. Kabupaten Pelalawan
 11. Kabupaten Rokan Hilir
 12. Kabupaten Rokan Hulu
 13. Kabupaten Siak
 5. **Provinsi Kepulauan Riau**
 1. Provinsi Kepulauan Riau
 2. Kota Batam
 3. Kabupaten Bintan
 4. Kabupaten Karimun
 5. Kabupaten Kepulauan Anambas
 6. Kabupaten Lingga
 7. Kabupaten Natuna
 8. Kota Tanjung Pinang
 6. **Provinsi Jambi**
 1. Provinsi Jambi
 2. Kabupaten Batang Hari
 3. Kabupaten Bungo
 4. Kota Jambi
 5. Kabupaten Kerinci
 6. Kabupaten Merangin
 7. Kabupaten Muaro Jambi
 8. Kabupaten Sarolangun
 9. Kota Sungaipenuh
 10. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 11. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 12. Kabupaten Tebo
 7. **Provinsi Bengkulu**
 1. Provinsi Bengkulu

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSN**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 261013GIQK
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

2. Kota Bengkulu
 3. Kabupaten Bengkulu Selatan
 4. Kabupaten Bengkulu Tengah
 5. Kabupaten Bengkulu Utara
 6. Kabupaten Kaur
 7. Kabupaten Kepahiang
 8. Kabupaten Lebong
 9. Kabupaten Muko Muko
 10. Kabupaten Rejang Lebong
 11. Kabupaten Seluma
- 8. Provinsi Sumatera Selatan**
1. Provinsi Sumatera Selatan
 2. Kabupaten Banyuasin
 3. Kabupaten Empat Lawang
 4. Kabupaten Lahat
 5. Kota Lubuk Linggau
 6. Kabupaten Muara Enim
 7. Kabupaten Musi Banyuasin
 8. Kabupaten Musi Rawas
 9. Kabupaten Musi Rawas Utara
 10. Kabupaten Ogan Ilir
 11. Kabupaten Ogan Komering Ilir
 12. Kabupaten Ogan Komering Ulu
 13. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
 14. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
 15. Kota Pagar Alam
 16. Kota Palembang
 17. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
 18. Kota Prabumulih
- 9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**
1. Provinsi Bangka Belitung
 2. Kabupaten Bangka
 3. Kabupaten Bangka Barat
 4. Kabupaten Bangka Selatan
 5. Kabupaten Bangka Tengah
 6. Kabupaten Belitung
 7. Kabupaten Belitung Timur
 8. Kota Pangkal Pinang
- 10. Provinsi Lampung**
1. Provinsi Lampung
 2. Kota Bandar Lampung
 3. Kabupaten Lampung Barat
 4. Kabupaten Lampung Selatan
 5. Kabupaten Lampung Tengah
 6. Kabupaten Lampung Timur

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSN**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 261013GIQK
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

7. Kabupaten Lampung Utara
8. Kabupaten Mesuji
9. Kota Metro
10. Kabupaten Pesawaran
11. Kabupaten Pesisir Barat
12. Kabupaten Pringsewu
13. Kabupaten Tanggamus
14. Kabupaten Tulang Bawang
15. Kabupaten Tulang Bawang Barat
16. Kabupaten Way Kanan

11. Provinsi Banten

1. Provinsi Banten
2. Kota Cilegon
3. Kabupaten Lebak
4. Kabupaten Pandeglang
5. Kota Serang
6. Kabupaten Serang
7. Kota Tangerang
8. Kabupaten Tangerang
9. Kota Tangerang Selatan

12. Provinsi Jawa Barat

1. Provinsi Jawa Barat
2. Kota Bandung
3. Kabupaten Bandung
4. Kabupaten Bandung Barat
5. Kota Banjar
6. Kota Bekasi
7. Kabupaten Bekasi
8. Kabupaten Bogor
9. Kota Bogor
10. Kabupaten Ciamis
11. Kabupaten Cianjur
12. Kota Cimahi
13. Kota Cirebon
14. Kabupaten Cirebon
15. Kota Depok
16. Kabupaten Garut
17. Kabupaten Indramayu
18. Kabupaten Karawang
19. Kabupaten Kuningan
20. Kabupaten Majalengka
21. Kabupaten Pangandaran
22. Kabupaten Purwakarta
23. Kabupaten Subang
24. Kota Sukabumi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSN**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 261013GIQK
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

25. Kabupaten Sukabumi
 26. Kabupaten Sumedang
 27. Kota Tasikmalaya
 28. Kabupaten Tasikmalaya
- 13. Provinsi DKI Jakarta**
1. Provinsi DKI Jakarta
- 14. Provinsi Jawa Tengah**
1. Provinsi Jawa Tengah
 2. Kabupaten Banjarnegara
 3. Kabupaten Banyumas
 4. Kabupaten Batang
 5. Kabupaten Blora
 6. Kabupaten Boyolali
 7. Kabupaten Brebes
 8. Kabupaten Cilacap
 9. Kabupaten Demak
 10. Kabupaten Grobogan
 11. Kabupaten Jepara
 12. Kabupaten Karanganyar
 13. Kabupaten Kebumen
 14. Kabupaten Kendal
 15. Kabupaten Klaten
 16. Kabupaten Kudus
 17. Kabupaten Magelang
 18. Kota Magelang
 19. Kabupaten Pati
 20. Kabupaten Pekalongan
 21. Kota Pekalongan
 22. Kabupaten Pemalang
 23. Kabupaten Purbalingga
 24. Kabupaten Purworejo
 25. Kabupaten Rembang
 26. Kota Salatiga
 27. Kabupaten Semarang
 28. Kota Semarang
 29. Kabupaten Sragen
 30. Kabupaten Sukoharjo
 31. Kota Surakarta

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSN**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 261013GIQK
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

32. Kabupaten Tegal
 33. Kota Tegal
 34. Kabupaten Temanggung
 35. Kabupaten Wonogiri
 36. Kabupaten Wonosobo
- 15. Provinsi DI Yogyakarta**
1. Provinsi DI Yogyakarta
 2. Kabupaten Bantul
 3. Kabupaten Gunung Kidul
 4. Kabupaten Kulon Progo
 5. Kabupaten Sleman
 6. Kota Yogyakarta
- 16. Provinsi Jawa Timur**
1. Provinsi Jawa Timur
 2. Kabupaten Bangkalan
 3. Kabupaten Banyuwangi
 4. Kota Batu
 5. Kabupaten Blitar
 6. Kota Blitar
 7. Kabupaten Bojonegoro
 8. Kabupaten Bondowoso
 9. Kabupaten Gresik
 10. Kabupaten Jember
 11. Kabupaten Jombang
 12. Kabupaten Kediri
 13. Kota Kediri
 14. Kabupaten Lamongan
 15. Kabupaten Lumajang
 16. Kabupaten Madiun
 17. Kota Madiun
 18. Kabupaten Magetan
 19. Kabupaten Malang
 20. Kota Malang
 21. Kabupaten Mojokerto
 22. Kota Mojokerto
 23. Kabupaten Nganjuk
 24. Kabupaten Ngawi
 25. Kabupaten Pacitan
 26. Kabupaten Pamekasan
 27. Kabupaten Pasuruan
 28. Kota Pasuruan
 29. Kabupaten Ponorogo
 30. Kabupaten Probolinggo
 31. Kota Probolinggo

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSN**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 261013GIQK
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

32. Kabupaten Sampang
33. Kabupaten Sidoarjo
34. Kabupaten Situbondo
35. Kabupaten Sumenep
36. Kota Surabaya
37. Kabupaten Trenggalek
38. Kabupaten Tuban
39. Kabupaten Tulungagung

17. Provinsi Bali

1. Provinsi Bali
2. Kabupaten Badung
3. Kabupaten Bangli
4. Kabupaten Buleleng
5. Kota Denpasar
6. Kabupaten Gianyar
7. Kabupaten Jembrana
8. Kabupaten Karangasem
9. Kabupaten Klungkung
10. Kabupaten Tabanan

18. Provinsi Nusa Tenggara Barat

1. Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Kabupaten Bima
3. Kota Bima
4. Kabupaten Dompu
5. Kabupaten Lombok Barat
6. Kabupaten Lombok Tengah
7. Kabupaten Lombok Timur
8. Kabupaten Lombok Utara
9. Kota Mataram
10. Kabupaten Sumbawa
11. Kabupaten Sumbawa Barat

19. Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Kabupaten Alor
3. Kabupaten Belu
4. Kabupaten Ende
5. Kabupaten Flores Timur
6. Kabupaten Kupang
7. Kota Kupang
8. Kabupaten Lembata
9. Kabupaten Malaka
10. Kabupaten Manggarai
11. Kabupaten Manggarai Barat
12. Kabupaten Manggarai Timur

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSN**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 261013GIQK
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

13. Kabupaten Nagekeo
14. Kabupaten Ngada
15. Kabupaten Rote Ndao
16. Kabupaten Sabu Raijua
17. Kabupaten Sikka
18. Kabupaten Sumba Barat
19. Kabupaten Sumba Barat Daya
20. Kabupaten Sumba Tengah
21. Kabupaten Sumba Timur
22. Kabupaten Timor Tengah Selatan
23. Kabupaten Timor Tengah Utara

20. Provinsi Kalimantan Barat

1. Provinsi Kalimantan Barat
2. Kabupaten Bengkayang
3. Kabupaten Kapuas Hulu
4. Kabupaten Kayong Utara
5. Kabupaten Ketapang
6. Kabupaten Kubu Raya
7. Kabupaten Landak
8. Kabupaten Melawi
9. Kabupaten Mempawah
10. Kota Pontianak
11. Kabupaten Sambas
12. Kabupaten Sanggau
13. Kabupaten Sekadau
14. Kota Singkawang
15. Kabupaten Sintang

21. Provinsi Kalimantan Selatan

1. Provinsi Kalimantan Selatan
2. Kabupaten Balangan
3. Kabupaten Banjar
4. Kota Banjarbaru
5. Kota Banjarmasin
6. Kabupaten Barito Kuala
7. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
8. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
9. Kabupaten Hulu Sungai Utara
10. Kabupaten Kota baru
11. Kabupaten Tabalong
12. Kabupaten Tanah Bumbu
13. Kabupaten Tanah Laut
14. Kabupaten Tapin

22. Provinsi Kalimantan Tengah

1. Provinsi Kalimantan Tengah

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSN**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 261013GIQK
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

2. Kabupaten Barito Selatan
3. Kabupaten Barito Timur
4. Kabupaten Barito Utara
5. Kabupaten Gunung Mas
6. Kabupaten Kapuas
7. Kabupaten Katingan
8. Kabupaten Kota waringin Barat
9. Kabupaten Kota waringin Timur
10. Kabupaten Lamandau
11. Kabupaten Murung Raya
12. Kota Palangka Raya
13. Kabupaten Pulang Pisau
14. Kabupaten Seruyan
15. Kabupaten Sukamara

23. Provinsi Kalimantan Timur

1. Provinsi Kalimantan Timur
2. Kota Balikpapan
3. Kabupaten Berau
4. Kota Bontang
5. Kabupaten Kutai Barat
6. Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Kabupaten Kutai Timur
8. Kabupaten Mahakam Ulu
9. Kabupaten Paser
10. Kabupaten Penajam Paser Utara
11. Kota Samarinda

24. Provinsi Kalimantan Utara

1. Provinsi Kalimantan Utara
2. Kabupaten Bulungan
3. Kabupaten Malinau
4. Kabupaten Nunukan
5. Kabupaten Tana Tidung
6. Kota Tarakan

25. Provinsi Gorontalo

1. Provinsi Gorontalo
2. Kabupaten Boalemo
3. Kabupaten Bone Bolango
4. Kabupaten Gorontalo
5. Kota Gorontalo
6. Kabupaten Gorontalo Utara
7. Kabupaten Pohuwato

26. Provinsi Sulawesi Barat

1. Provinsi Sulawesi Barat

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSN**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 261013GIQK
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

2. Kabupaten Majene
 3. Kabupaten Mamasa
 4. Kabupaten Mamuju
 5. Kabupaten Mamuju Tengah
 6. Kabupaten Mamuju Utara
 7. Kabupaten Polewali Mandar
- 27. Provinsi Sulawesi Selatan**
1. Provinsi Sulawesi Selatan
 2. Kabupaten Bantaeng
 3. Kabupaten Barru
 4. Kabupaten Bone
 5. Kabupaten Bulukumba
 6. Kabupaten Enrekang
 7. Kabupaten Gowa
 8. Kabupaten Jeneponto
 9. Kabupaten Kepulauan Selayar
 10. Kabupaten Luwu
 11. Kabupaten Luwu Timur
 12. Kabupaten Luwu Utara
 13. Kota Makassar
 14. Kabupaten Maros
 15. Kota Palopo
 16. Kabupaten Pangkajene Kepulauan
 17. Kota Parepare
 18. Kabupaten Pinrang
 19. Kabupaten Sidenreng Rappang
 20. Kabupaten Sinjai
 21. Kabupaten Soppeng
 22. Kabupaten Takalar
 23. Kabupaten Tana Toraja
 24. Kabupaten Toraja Utara
 25. Kabupaten Wajo
- 28. Provinsi Sulawesi Tenggara**
1. Provinsi Sulawesi Tenggara
 2. Kota Bau-Bau
 3. Kabupaten Bombana
 4. Kabupaten Buton
 5. Kabupaten Buton Selatan
 6. Kabupaten Buton Tengah
 7. Kabupaten Buton Utara
 8. Kota Kendari
 9. Kabupaten Kolaka
 10. Kabupaten Kolaka Timur
 11. Kabupaten Kolaka Utara
 12. Kabupaten Konawe

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSN**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 261013GIQK
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

13. Kabupaten Konawe Kepulauan
14. Kabupaten Konawe Selatan
15. Kabupaten Konawe Utara
16. Kabupaten Muna
17. Kabupaten Muna Barat
18. Kabupaten Wakatobi

29. Provinsi Sulawesi Tengah

1. Provinsi Sulawesi Tengah
2. Kabupaten Banggai
3. Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Kabupaten Banggai Laut
5. Kabupaten Buol
6. Kabupaten Donggala
7. Kabupaten Morowali
8. Kabupaten Morowali Utara
9. Kota Palu
10. Kabupaten Parigi Moutong
11. Kabupaten Poso
12. Kabupaten Sigi
13. Kabupaten Tojo Una-Una
14. Kabupaten Toli-Toli

30. Provinsi Sulawesi Utara

1. Provinsi Sulawesi Utara
2. Kota Bitung
3. Kabupaten Bolaang Mongondow
4. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
5. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
6. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
7. Kabupaten Kepulauan Sangihe
8. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro)
9. Kabupaten Kepulauan Talaud
10. Kota Kota mobagu
11. Kota Manado
12. Kabupaten Minahasa
13. Kabupaten Minahasa Selatan
14. Kabupaten Minahasa Tenggara
15. Kabupaten Minahasa Utara
16. Kota Tomohon

31. Provinsi Maluku

1. Provinsi Maluku
2. Kota Ambon
3. Kabupaten Buru
4. Kabupaten Buru Selatan
5. Kabupaten Kepulauan Aru

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSN**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 261013GIQK
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

6. Kabupaten Maluku Barat Daya
7. Kabupaten Maluku Tengah
8. Kabupaten Maluku Tenggara
9. Kabupaten Maluku Tenggara Barat
10. Kabupaten Seram Bagian Barat
11. Kabupaten Seram Bagian Timur
12. Kota Tual

32. Provinsi Maluku Utara

1. Provinsi Maluku Utara
2. Kabupaten Halmahera Barat
3. Kabupaten Halmahera Selatan
4. Kabupaten Halmahera Tengah
5. Kabupaten Halmahera Timur
6. Kabupaten Halmahera Utara
7. Kabupaten Kepulauan Sula
8. Kabupaten Pulau Morotai
9. Kabupaten Pulau Taliabu
10. Kota Ternate
11. Kota Tidore Kepulauan

33. Provinsi Papua

1. Provinsi Papua
2. Kabupaten Biak Numfor
3. Kabupaten Jayapura
4. Kabupaten Keerom
5. Kabupaten Mamberamo Raya
6. Kabupaten Sarmi
7. Kabupaten Supiori
8. Kabupaten Waropen
9. Kabupaten Kepulauan Yapen
10. Kota Jayapura

34. Provinsi Papua Barat

1. Provinsi Papua Barat
2. Kabupaten Fak Fak
3. Kabupaten Kaimana
4. Kabupaten Manokwari Selatan
5. Kabupaten Manokwari
6. Kabupaten Pegunungan Arfak
7. Kabupaten Teluk Bintuni
8. Kabupaten Teluk Wondama

35. Provinsi Papua Selatan

1. Provinsi Papua Selatan
2. Kabupaten Asmat
3. Kabupaten Boven Digoel

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSN**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 261013GIQK
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

4. Kabupaten Mappi
 5. Kabupaten Merauke
- 36. Provinsi Papua Tengah**
1. Provinsi Papua Tengah
 2. Kabupaten Deiyai
 3. Kabupaten Dogiyai
 4. Kabupaten Intan Jaya
 5. Kabupaten Mimika
 6. Kabupaten Nabire
 7. Kabupaten Paniai
 8. Kabupaten Puncak
 9. Kabupaten Puncak Jaya
- 37. Provinsi Papua Barat Daya**
1. Provinsi Papua Barat Daya
 2. Sekertaris Daerah Kabupaten Maybrat
 3. Kabupaten Raja Ampat
 4. Kabupaten Sorong
 5. Kabupaten Sorong Selatan
 6. Kabupaten Tambrau
 7. Kota Sorong
- 38. Provinsi Papua Pegunungan**
1. Provinsi Papua Pegunungan
 2. Kabupaten Jayawijaya
 3. Kabupaten Lanny Jaya
 4. Kabupaten Mamberamo Tengah
 5. Kabupaten Nduga
 6. Kabupaten Pegunungan Bintang
 7. Kabupaten Tolikara
 8. Kabupaten Yalimo
 9. Kabupaten Yahukimo

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSN**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 261013GIQK
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**